



**REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG**

Jln. Raya Padang-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25652

Laman <https://bayangkec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

Email: Kantor.camatbayang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunianya, PD Kecamatan Bayang telah menyelesaikan Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Revisi Rencana Kerja Tahun 2026 ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan PD Kecamatan Bayang, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Revisi Rencana Kerja Tahun 2026 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Revisi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Revisi Rencana Kerja (Renja) ini. Dan juga Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin YRA....



Pasar Baru, 18 Juni 2026
Camat Bayang,

YOHENDRO NASTI, S.STP, MM.
NIP. 198607272006021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renstra PD Kecamatan Bayang.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kantor Camat Bayang.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	29
2.4. Reveuw Terhadap Rancangan Awal PD.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN dan SASARAN RENJA PD	55
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	55
3.3. Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	75
BAB V PENUTUP	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Pesisir selatan	18
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang	27
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	35
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Bayang	41
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026	61
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Bayang	66
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayang Tahun 2026	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah yang wajib disusun oleh seluruh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas

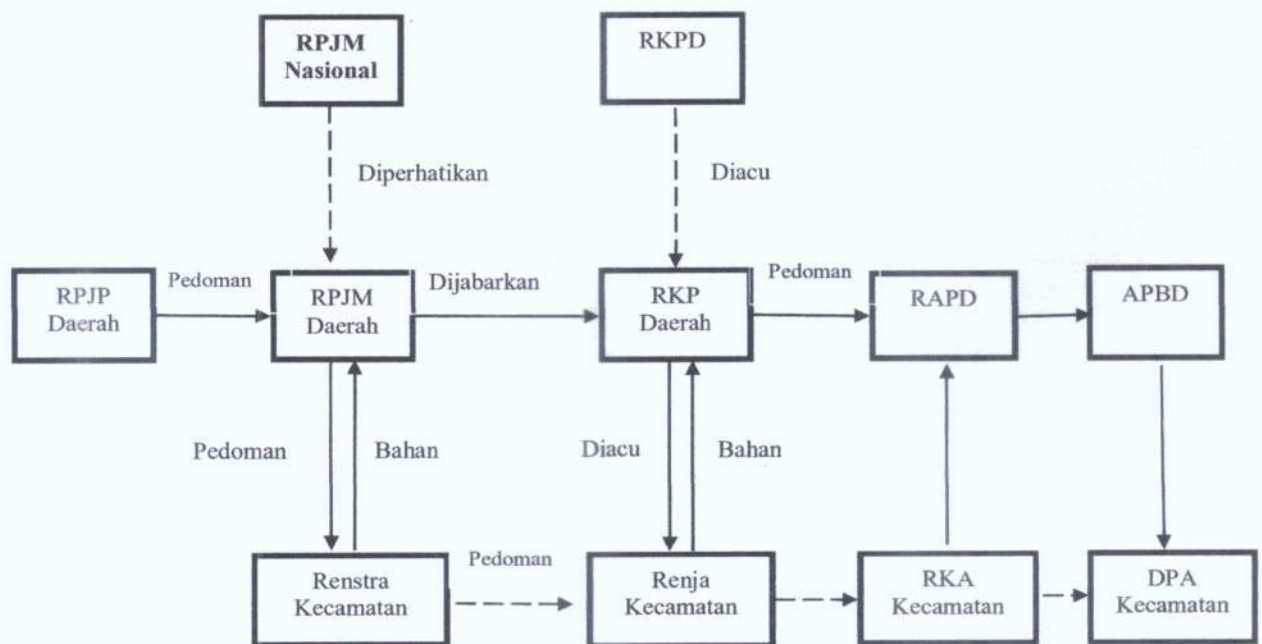
pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Bayang Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bayang Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Bayang Tahun 2026



Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Bayang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayang Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

✓ Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai

perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Bayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

✓ **TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bayang dalam menentukan prioritas Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bayang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bayang untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2026.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan

Renja propinsi/kabupaten/kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Berisikan uraian mengenai :

- ✓ Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, diuraikan mengenai koordinasi

- dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- ✓ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - ✓ Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
 - ✓ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
 - ✓ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisikan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- ✓ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- ✓ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan;

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- ✓ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- ✓ Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- ✓ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- ✓ Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 senilai Rp 2.733.945.986,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. Rp2.089.729.420,- (Dua milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 terdapat 8 (delapan) kegiatan yang dengan status capaian "sedang" (76,44%). Untuk capaian kinerja keluaran (*output*) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ keluaran yang direncanakan :

No	Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, dan institusi lainnya
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemnbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
8	Administrasi Kepegawaian	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan

	Perangkat Daerah	pengelolaan keuangan yang baik
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 09 Juni 2025 ada 5 (Lima) kegiatan yang keluarannya mencapai target dan tidak ada kegiatan yang tidak mencapai target ataupun dengan keluaran yang melebihi target.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 dengan Rancangan Anggaran sebesar Rp. 2.633.415.186,- yang terurai dalam 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target

Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bayang sebagai berikut :

1. Ketebatasan Anggaran
2. Keterbatasan data dan informasi

3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bayang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah

- # Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor Tersebut.

Pada faktor – faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bayang melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggung jawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/ tindakan untuk memperkecil resiko/ akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Bayang dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Bayang sampai dengan Tahun berjalan,
dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.567.703.186	2.656.981.057	2.812.896.629	2.683.997.681	94%	2.633.415.186	1.194.700.275	46%
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	0	6.744.000	6.744.000	99%	0	6.748.500	42%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00.000	0	6.744.000	6.744.000	0	0	6.748.500	42%
7	01	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.985.986	2.271.933.061	2.481.446.365	2.357.324.634	93%	2.390.985.986	1.043.930.930	44%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.269.636.447	2.246.433.061	2.435.126.365	2.311.004.634		2.320.500.986	1.012.392.301	44%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.060.000	25.000.000	46.320.0000	46.320.000		70.485.000	31.538.629	43%
7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0%	0	0	0%

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		68.838.460	79.699.343	163.301.040	159.112.835	99%	99.824.081	90.225.000	126%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17.547.500	15.819.460	15.819.460	15.819.400		6.141.959	9.502.500	193%
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17.518.700	18.984.330	18.984.330	18.984.300		16.697.712	11.948.000	109%
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.504.000	11.762.250	11.762.250	11.762.250		9.294.410	7.250.000	131%
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	3.700.000	68%
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	5.595.400	6.600.000	6.600.000	6.600.000		6.600.000	4.275.000	125%
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	37.200.000	105.175.000	105.175.000	100.986.885		55.690.000	53.549.500	129%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		35.000.000	190.064.370	17.172.400	17.172.400	0	0	143.173.000	65%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	0	0		0	0			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43.379.507	17.172.000	17.172.400	17.172.400	0	0	143.173.000	65%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.968.740	86.184.283	103.932.824	103.343.862	99%	100.055.119	27.834.345	39%

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang di bayarkan (KVA/bulan)	30.926.000	20.968.428	20.968.428	20.379.546	0	20.968.740	5.849.345	47%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	34.761.000	82.964.396	82.964.396	82.964.316	0	79.086.379	21.985.000	37%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.910.000	29.100.000	40.300.000	40.299.950	99%	42.550.000	25.961.500	71%
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas OpeasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4.400.000	34.100.000	34.100.000	34.099.950	0	34.100.000	7.650.000	34%
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.123.0000	6.600.000	6.200.000	6.200.000	0	8.450.000	6.600.000	64%
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	90.560.500	0	0	0	0	0	0	0%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	0	55.526.000	55.526.000	100%	0	38.189.500	82%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0	0	55.526.000	55.526.000	100%	0	38.189.500	82%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi	89.320.500	0	0	0	0	0	125.000	03%

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah Lomba UKS yang diikuti & di bina Jumlah kegiatan PHBI yang diperingati Jumlah LDS yang difasilitasi & dibina	38.780.000	0	55.526.000	55.526.000	0	77.525.000	38.064.500	85%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		48.862.000	0	75.045.368	75.032.200	99%	56.262.660	25.228.000	43%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		48.862.000	0	75.045.368	75.032.200	99%	48.862.660	25.228.000	43%
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas	26.264.000	0	20.579.000	20.579.000	0	10.969.000	10.563.000	34%
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina Jumlah produk unggulan yang dibina	3.512.500	0	54.466.368	54.453.200	0	37.893.660	14.665.000	53%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		0	0	0	0	100%	0	2.005.000	20%
				01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal lainnya		0	0	0	0	100%	0	2.005.000	20%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		10.000.000	0	71.438.368	71.356.000	100%	41.798.140	0	0%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		10.000.000	0	71.438.368	71.356.000	100%	41.798.140	0	0%
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan PHBN	4.350.000	0	71.438.368	71.356.000	0	41.789.140	0	0%

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15.630.000	0	0	0	0	0	0	0%
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		6.500.000	0	17.220.000	17.220.000	100%	9.870.000	13.405.000	33%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6.500.000	0	17.220.000	17.220.000	100%	9.870.000	13.405.000	33%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	2.705.482.054	0	17.220.000	17.220.000	100%	9.870.000	13.405.000	33%
					Jumlah		2.633.415.186	2.656.981.057	3.032.126.365	2.903.131.881	94%	2.733.945.986	1.273.527.775	46%

Sumber data : Kecamatan Bayang

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bayang Tahun 2021-2026.

Adapun Evaluasi terhadap capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 senilai **Rp 2.733.945.986,-** (Dua milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan realisasi anggaran sampai dengan kondisi Triwulan II sebesar **Rp 1.225.552.462,-** (Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

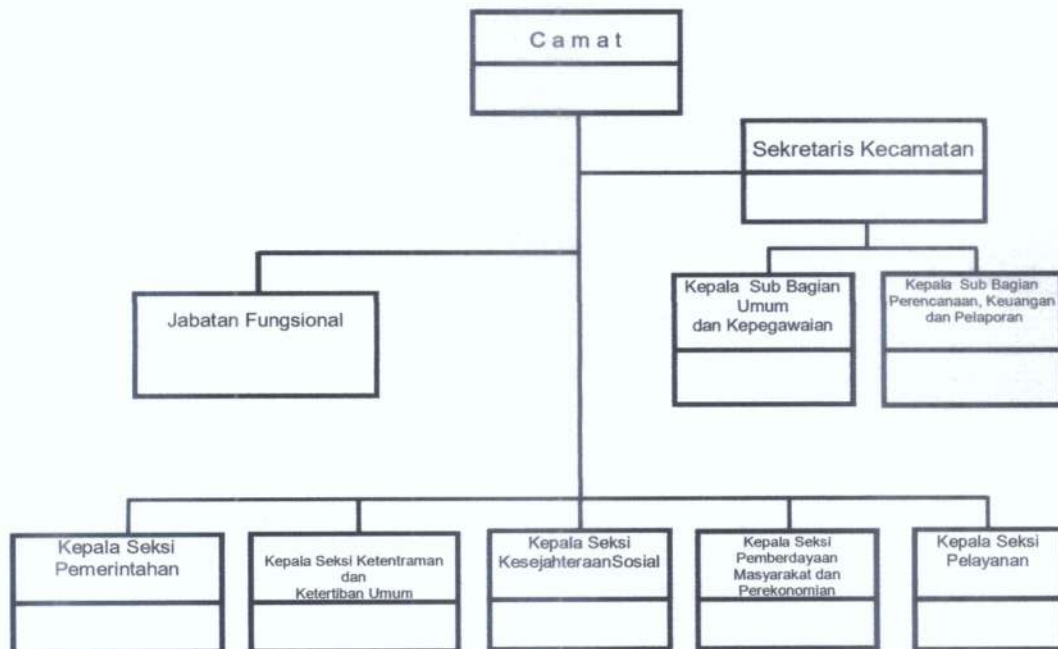
Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 terdapat 4 program kegiatan dengan capaian 76,44% hal ini disebabkan karena realisasi masih dalam kondisi Triwulan II dan masih banyaknya kegiatan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada Triwulan III dan IV. Sehingga secara garis besar capaian kinerja keluaran (output) kegiatan pada kondisi Triwulan III sudah tercapai sesuai perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Kerjasama wilayah perbatasan
7. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
8. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitasi pembentukan kelompok HKm (Hutan Kemasyarakatan)

5. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
8. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (EPPGM)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	BB (74,00)	B (65,0)	B (68,0)	BB (71,0)	BB (78,8)	B (62,00)	B (68,0)	BB (71,0)	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	86	87	88	84	85	87	88	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			75	78	80	82	74	75	80	82	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	78%	81%	84%	75%	75%	81%	84%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	-	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
6.	Prevalensi Stunting (EPPGM)	-	-	7,00%	6,5%	6,0%	5,5%	7,12%	7,00%	6,0%	5,5%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	-	-	80%	82%	84%	86%	80%	80%	84%	86%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Sumber Data: Kecamatan Bayang

Tabel analisis pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bayang berdasarkan angka realisasi Bulan Juni tahun 2025 yang akan disajikan berikut ini :

No	OPD Pelaksana	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.985.986	1.089.706.956
2	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.824.081	51.184.000
3	KECAMATAN BAYANG	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0
4	KECAMATAN BAYANG	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.055.119	42.805.506
5	KECAMATAN BAYANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.550.000	18.150.000
6	KECAMATAN BAYANG	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.862.660	22.236.000
7	KECAMATAN BAYANG	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.798.140	0
8	KECAMATAN BAYANG	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	9.870.000	1.470.000

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bayang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bayang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan sumber daya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan:

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Bayang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi

Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bayang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.

- b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

- c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
 - d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
 - e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;
- Upaya yang telah dilakukan adalah :
- 1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
 - 2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang ekonomi pembangunan di Kecamatan Bayang pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi bidang pembangunan sehingga memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipadu selaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2024 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja 2026 SKPD Kecamatan Bayang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja RKPD tahun 2026 Kecamatan Bayang berdasarkan tabel Tabel 2.3 T-C.31 di bawah ini :

Tabel 2.3 Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (data renstra tahun 2026)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	2.567.703.186	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	2.567.703.186	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	4.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	4.000.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15	4.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	2.390.985.986	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	2.390.985.986	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	23	2.320.500.986	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	23	2.320.500.986	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	70.485.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	70.485.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	68.838.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	68.838.460
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	6.141.959	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	6.141.959
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	10.697.712	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	10.697.712
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	9.308.789	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bayang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	9.308.789
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	3	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	3	5.400.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	6.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	6.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	100	30.690.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	100	30.690.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	35.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Mebel	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	5.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	5.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	30.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	55.968.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	55.968.740	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	2	20.966.740	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	2	20.966.740	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	12.910.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	12.910.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	3.410.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	3.410.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12	4.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12	4.500.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	5.000.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bayang	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bayang	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayang	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayang	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)			

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)			
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	80	48.862.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	80	48.862.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	80	48.862.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	80	48.862.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	10.969.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	10.969.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	37.893.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	37.893.000	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Bayang	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	350.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Bayang	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	350.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	350.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	350.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		350.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		350.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh			

			Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)					Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)			
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	10.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	10.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	1	10.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bayang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	1	10.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	0	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	6.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	6.500.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	6.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	6.500.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)			
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	0	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	0	
Jumlah					2.633.415.186	Jumlah					2.633.415.186

Sumber data :Renstra dan Renja 2026 Kecamatan Bayang

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Bayang. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Bayang berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Bayang Tahun 2025 adalah sebagai tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4 Tabel. T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

No.	Program Pro-Rakyat	Arah Pembangunan Tahun 2025	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Nagari)	Volume	Pagu	PD Penanggung Jawab	Keterangan		
									SPM	Stunting	Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nagari Kanyang	Memperkuat basiss agrikuitur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Pembangunan Rumah Kompos Nagari	Masyarakat	Pasar Baru	1 Paket	300.000.000,-	Dinas Pertanian		√	
			Pengadaan Itik Bertelur dan Ternak Sapi	Masyarakat	Api-Api	5 Paket	500.000.000,-	Dinas Pertanian		√	
			Pembangunan Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana pertanian (Pengadaan Pompa air)	Masyarakat	Tanjung Durian	1 Paket	150.000.000,-	Dinas Pertanian		√	
			Pembangunan Irigasi Taluak Dalam	Masyarakat	Asam Kamba	1 Paket	2.000.000.000,-	Dinas PUTR		√	

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Masyarakat	Sawah Laweh	4 Paket	500.000.000,-	Dinas pertanian	√	
		Irigasi Banda Tengah	Masyarakat	Talaok	1600 M	2.000.000.000,-	Dinas PUTR	√	
		Peningkatan Irigasi Kapalo Banda	Masyarakat	Aur Begalung	3 Paket	350.000.000,-	Dinas PUTR	√	
		Pembangunan Saluran Irigasi Kelompok Tani Banda Malintang	Masyarakat	Kapeh Panji Jaya	2 Paket	240.000.000,-	Dinas PUTR	√	
		Saluran Irigasi Sungai Sugu Banda Rawang	Masyarakat	Koto Berapak	20 Paket	250.000.000,-	Dinas PUTR	√	
		Pembangunan Rehabilitasi dan Prasarana Pertanian (Irigasi Banda Sago dan Banda Barumbuang)	Masyarakat	kapelgam	1 Paket	45.000.000,-	Dinas PUTR	√	
		Pembangunan Irigasi Banda Pinang	Masyarakat	Koto Baru	4 Paket	800.000.000,-	Dinas PUTR	√	

			Pembangunan/Perbaikan Irigasi Kelompok Tani	Masyarakat	Kubang	1 TA	500.000.000,-	Dinas PUTR	√	
			Pembangunan Kapalo Banda Pulau	Masyarakat	Kapujan	1 TA	1.500.000.000	Dinas PUTR	√	
			Pengadaan Saluran Irigasi Banda Gadang	Masyarakat	Gurun Panjang	1 Paket	800.000.000	Dinas PUTR	√	
			Pengadaan Bibit Padu Unggul dan pupuk bersubsidi	Masyarakat	Gurun Panjang Barat	1 Paket	350.000.000,-	Dinas PUTR	√	
			Pembangunan Irigasi Batang Lumpo	Masyarakat	Gurun Panjang Utara	1 Paket	300.000.000,-	Dinas PUTR	√	
			Irigasi Primer dan Skunder	Masyarakat	Gurun Panjang Selatan	1 Paket	250.000.000,-	Dinas PUTR	√	
2	Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	pengadaan Mobiler SDN 02, 05 dan SDN 34 Pasar Baru	Siswa Sekolah	Pasar Baru	1 Paket	200.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
			Pengadaan Mobiler SDN 38 dan SDN 12 Api-Api	Siswa Sekolah	Api-Api	1 Paket	300.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	

Pengembangan/Rehabilitas Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	Siswa Sekolah	Tanjung Durian	2 Paket	300.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Pelatihan Menjahit	Masyarakat	Asam Kamba	4 Paket	500.000.000,-	Dinas koperindag	√		
Beasiswa Anak Sekolah SD, SMP,SMA dan Anak Mengaji	Siswa Sekolah	Sawah Laweh	2 Paket	500.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Rehab Pagar SDN 04 Talaok dan SDN 36 Lubuk Pasing	Siswa Sekolah	Talaok	2 Paket	200.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Pembangunan Mushalla Lubuk Aur dan MIN 1 Pessel	masyarakat	Aur Begalung	2 Paket	300.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
Penyediaan Beasiswa Untuk Masyarakat Miskin	Siswa Sekolah	Kapeh Panji Jaya	1 Paket	250.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
Pembangunan Pustaka Nagari	Masyarakat	Koto Berapak	1 Paket	350.000.000,-	Dinas Kearsipan	√		

Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 37 Lubuk Gambir dan SDN 17 Kapencong	Siswa Sekolah	kapelgam	200 M	100.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Rehab Jalan Menuju SD 20 Koto Baru	Siswa Sekolah	Koto Baru	150 meter	100.000.000,-	Dinas PUPR	√		
Peningkatan Pagar SDN 42 Kubang	Siswa Sekolah	Kubang	12 Bulan	50.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Pembangunan Pagar dan pengecoran halaman SD 33 dan 11 Kapujan	Siswa Sekolah	Kapujan	2 Paket	500.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Rehab dan Pengadaan Mobiler SD 32, 46 dan 40 Lereng Bukit	Siswa Sekolah	Gurun Panjang	1 Paket	400.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Pengecoran Halaman SD 22 Tanah Kareh	Siswa Sekolah	Gurun Panjang Barat	1 Paket	200.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		
Pengadaan Pelengkapan Mobiler SDN 03 Kampung Tengah	Siswa Sekolah	Gurun Panjang Utara	4 Paket	500.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√		

			Kegiatan Pembinaan pemuda dan Olahraga	pemuda	Gurun Panjang Selatan	2 Paket	500.000.000,-	Dinas pemuda dan olah raga	√		
3	Nagari Mangaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS,SBK	Rehab MDA Baitusholihin	Masyarakat	Pasar Baru	1 TA	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pengadaan Mobiler MDA Mujahidin	Masyarakat	Api-API	1 TA	50.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pembangunan/Rehabilitas Mesjid dan Mushalla	Masyarakat	Tanjung Durian	12 Meter	27.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pelatihan Pengkaderan Mubaliq di Nagari	Masyarakat	Asam Kamba	1 paket	100.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		

			Rehab Gedung MDA	Siswa	Sawah Laweh	1 paket	200.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pembangunan TPA/TPSA Nagari Talaok	siswa	Talaok	6 Unit	300.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pembangunan Mushala SDN 14 Lubuk Aur dan MIN 1 Pessel	siswa	Aur Begalung	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Pemeliharaan Gedung MDA	siswa	Kapeh Panji Jaya	1 paket	100.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Rehab Mushalla	masyarakat	Koto Berapak	1 paket	100.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		

		Penambahan Sarana dan Prasarana TPA/MDA AL Munawarah dan honor garin mesjid raya Almunawarah	siswa	kapelgam	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
		Rehab mushalla atau Peningkatan Pembangunan Surau Banda	masyarakat	Koto Baru	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
		Pembangunan Pagar Besi TPA Darul Ihsan	masyarakat	Kubang	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
		Rehab MDA Surau Patai	siswa	Kapujan	1 paket	250.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
		Rehab Mushalla / Mesjid	masyarakat	Gurun Panjang	1 Paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		

			Pembangunan MCK Mesjid dan insentif garin mesjid/mushalla	masyarakat	Gurun Panjang Barat	1 Paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Rehab Mesjid Baitul Mukmin Kampung Tengah	masyarakat	Gurun Panjang Utara	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
			Peningkatan Baca Al-quran anak-anak dan Dewasa dan honor guru mengaji dan garin	siswa	Gurun Panjang Selatan	1 paket	150.000.000,-	Bagian Kesra Sekretaris Daerah	√		
4	Nagari Sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwaju dan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Pemberian Makanan Bergizi	ibu hamil dan balita	Pasar Baru	1 Paket	300.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
			Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan	Masyarakat	Api-API	1 Paket	100.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Masyarakat	Tanjung Durian	10 Unit	1.000.000.000,-	Dinas PUPR		√	

		Pembangunan Jambanisasi	Masyarakat	Asam Kamba	120 unit	480.000.000,-	Dinas PUPR		√	
		Peningkatan Gizi Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Lansia	ibu hamil dan balita	Sawah Laweh	1 Paket	100.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
		Pemberian Makanan Bergizi	Anak-anak Stunting dan Penderita Gizi Buruk	Talaok	1 Paket	250.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
		Pemberian Makanan Bergizi	Anak-anak Stunting dan Penderita Gizi Buruk	Aur Begalung	1 Paket	250.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
		Pembangunan Rumah Layak Huni	Masyarakat	Kapeh Panji Jaya	50 Unit	350.000.000,-	Dinas PUPR		√	
		Pengadaaan Ambulance	masyarakat	Koto Berapak	2 Paket	300.000.000,-	Dinas Kesehatan		√	
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat Lansia, Miskin, Penderita Sakit Menahun	kapelgam	20 Unit	500.000.000,-	Dinas PUPR		√	

akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (65)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	78
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	78%
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	6,5%
2.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program	: 6 (Enam)
Jumlah Kegiatan	: 11 (Sebelas)
Jumlah Sub Kegiatan	: 25 (Dua Puluh Lima)
Pagu Indikatif APBD	: Rp 2.633.415.186,- (<i>Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah</i>).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

V. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,633,415,186				0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,567,703,186				0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,000,000				0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	15 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	20 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,390,985,986				0	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	23 Orang/bulan	12 bulan	2,320,500,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 bulan	70,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								68,838,460				0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	1 Paket	12 bulan	6,141,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	0 Paket	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Paket	12 bulan	10,697,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	2 Paket	12 bulan	9,308,789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	3 Dokumen	12 bulan	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Bayang	100 %	1 Laporan	12 bulan	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	12 bulan	30,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000					0
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhiya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	1 Unit Mimbar	1 unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhi nya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	2 Laptop, 2 Unit PC, 2 Printer dan Ginset	7 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhi nya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55,968,740				0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	2 Laporan	12 bulan	20,968,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	2 Laporan	12 bulan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,910,000				0	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhi ya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	2 Unit	12 bulan	3,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhi ya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	12 Unit	12 bulan	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Terpenuhi ya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	100 %	3 Unit	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0				0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0				0		

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terselenggara urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Semua Kelurahan		1 Laporan		0					
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggara urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang	85 Tanpa Satuan	1 Laporan	12 Bulan	0					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								48,862,000					0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								48,862,000					0
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang		17 Lembaga	12 Bulan	10,969,000					

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang		1 Laporan	12 Bulan	37,893,000				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								350,000				0
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								350,000				0
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang		1 Laporan	12 Bulan	350,000				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang				0				

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								10,000,000				0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								10,000,000				0
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaraanya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang		12 Orang	12 Bulan	10,000,000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaraanya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Bayang, Bayang		1 Dokumen	12 Bulan	0				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								6,500,000				0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								6,500,000				0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Dokumen		6,500,000				

7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut				0						
					TOTAL														0

Sumber Data : Renstra kecamatan bayang Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bayang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bayang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Tabel TC-27 (data dari sipd)

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)		100	2,567,703,186	Kec. Bayang	
			7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		100	4,000,000	Kec. Bayang	
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		4	4,000,000	Kec. Bayang	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		8	0	Kec. Bayang	
			7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)		100	2,390,985,986	Kec. Bayang	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		168	2,320,500,986	Kec. Bayang	

				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	70,485,000	Kec. Bayang	
7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	68,838,460	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	6,141,959	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	10,697,712	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	9,308,789	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)		5,400,000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	1	6,600,000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	30,690,000	Kec. Bayang	

7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	35,000,000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel n yang Disediakan (unit)	1	5,000,000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	30,000,000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)			Kec. Bayang	
7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	55,968,740	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	20,968,740	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	35,000,000	Kec. Bayang	
7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	12,910,000	Kec. Bayang	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)		4	3,410,000	Kec. Bayang	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		8	4,500,000	Kec. Bayang	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		2	5,000,000	Kec. Bayang	
		7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		85%	0	Kec. Bayang	
		7	01	02	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)		70	0	Kec. Bayang	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)				Kec. Bayang	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)				Kec. Bayang	

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah nagari lengkap kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	6,500,000	Kec. Bayang
		7	01	06	2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	6,500,000	Kec. Bayang
						Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)		6,500,000	Kec. Bayang
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	1	0	Kec. Bayang
		7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	40	48,862,000	Kec. Bayang
		7	01	03	2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	40	48,862,000	Kec. Bayang

			7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	10,000,000	Kec. Bayang	
			7	01	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	10,000,000	Kec. Bayang	
							Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)		10,000,000	Kec. Bayang	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	0	Kec. Bayang	
JUMLAH										2,633,415,186		

Sumber Data : Sipd-ri kecamatan Bayang tahun 2026

BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Strategis tahun 2025–2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Revisi Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Revisi Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.


Pasar Baru, 18 Juni 2026
Camat Bayang,
YOHENDRO NASTI, S.STP, MM.
NIP. 198607272006021001